

SIAKBA DAN INSTAGRAM: KESENJANGAN DIGITALISASI ADMINISTRATIF DAN PARTISIPATIF PADA KPU KOTA SEMARANG

Muhammad Yuwanandra Risdyaksa^{1*}

¹Universitas Dian Nuswantoro, Indonesia

*Corresponding email: yuwanandrarisdyaksa7677@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membandingkan SIAKBA, aplikasi rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dengan Instagram, kanal komunikasi utama KPU Kota Semarang kepada pemilih, untuk menguji keseimbangan digitalisasi administratif dan partisipatif. Studi kasus kualitatif ini memadukan analisis dokumen kelembagaan, sintesis literatur, dan data pembandingan World Bank. Hasilnya menunjukkan asimetri tajam: SIAKBA matang dan tertanam dalam siklus rekrutmen, sedangkan Instagram meningkatkan kesadaran pemilih muda tetapi masih berada pada tahap e-enabling dengan komunikasi satu arah. Selisih skor interpretatif kesenjangan digitalisasi demokrasi (KDD) bernilai 2, yakni nilai maksimum. Pola serupa tampak secara nasional karena kemajuan digital Indonesia ditopang sistem inti pemerintahan, sementara keterlibatan warga tertinggal. Kesenjangan ini lebih mencerminkan pilihan desain kelembagaan daripada keterbatasan teknologi.

Kata kunci: SIAKBA, Instagram, Digitalisasi Pemilu, Demokrasi Digital, KPU Kota Semarang

Abstract: This study compares SIAKBA, the electronic recruitment application for Sub-District Election Committees (PPK), with Instagram, the main channel through which the Semarang City Election Commission communicates with voters, to test whether administrative and participatory digitalization are balanced. Using a qualitative case study that combines institutional document analysis, literature synthesis, and World Bank benchmark data, it finds a sharp asymmetry: SIAKBA is mature and embedded in the recruitment cycle, whereas Instagram raises young voters' awareness but remains at the e-enabling stage with one-way communication. The interpretive digital democracy gap (KDD) score is 2, the maximum value. A similar pattern appears nationally, as Indonesia's digital progress rests on core government systems while citizen engagement lags. The gap reflects institutional design choices rather than technological limits.

Keywords: SIAKBA, Instagram, Election Digitalization, Digital Democracy, Semarang City Election Commission

PENDAHULUAN

Digitalisasi lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia bergerak cepat dalam satu dekade terakhir, seiring transformasi digital Kota Semarang yang lebih luas (Aisyah et al., 2024) dan dorongan KPU pusat untuk memodernisasi pendaftaran partai, rekapitulasi suara, serta komunikasi publik. Kemajuan itu, meskipun demikian, tidak merata antarfungsi. Sistem yang menopang kerja internal komisi cenderung lebih cepat matang daripada sistem yang menghubungkan komisi dengan warga. Temuan lintas negara juga menunjukkan bahwa inisiatif pemerintahan elektronik tidak cukup dinilai dari sisi teknokratis dan efisiensi layanan, sebab keterlibatan warga membutuhkan perhatian tersendiri (Iuliano et al., 2025). Ketimpangan tersebut tampak jelas ketika dua sistem digital milik KPU Kota Semarang diletakkan berdampingan, yaitu SIAKBA, aplikasi elektronik untuk rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Instagram, kanal digital utama komisi untuk menjangkau pemilih.

Perbandingan kedua sistem bernilai secara metodologis karena tiga alasan. Pertama, keduanya dikelola institusi yang sama sehingga perbedaan di antaranya tidak dapat dikembalikan pada selisih sumber daya atau kapasitas kelembagaan, melainkan mengarah pada prioritas dan desain sistem. Kedua, fungsinya berlawanan: SIAKBA bersifat internal dan administratif, sedangkan Instagram bersifat eksternal dan komunikatif, sehingga kontras keduanya cocok untuk menguji dugaan asimetri antara digitalisasi administratif dan partisipatif yang banyak dibahas dalam kajian tata kelola elektronik. Ketiga, masing-masing sudah pernah dikaji secara terpisah, yakni SIAKBA oleh Wulandari et al. (2023) dan Instagram oleh Utami et al. (2024), tetapi belum pernah dipertemukan dalam satu kerangka

analisis. Peluang untuk memperoleh wawasan baru dengan menyatukan kedua temuan tersebut karenanya masih terbuka.

Urgensi kajian ini juga berkaitan dengan perubahan komposisi pemilih. Pemilih muda dan pemilih pemula bertambah pada setiap siklus pemilu, dan kelompok ini cenderung mengonsumsi informasi dalam format yang lebih visual, cepat, dan interaktif dibandingkan generasi sebelumnya (Febriyan et al., 2025). Apabila Instagram, sebagai kanal yang paling dekat dengan kelompok tersebut, hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, risikonya tidak terbatas pada rendahnya keterlibatan digital, tetapi juga menurunnya mutu dialog publik tentang hak dan prosedur pemilu di kalangan pemilih yang jumlahnya terus meningkat.

Kesenjangan Penelitian dan Rumusan Masalah

Penelitian ini menandai dua kesenjangan. Kesenjangan pertama bersifat integratif. Studi SIAKBA (Fauzi et al., 2025) menyoroti efisiensi administrasi, sedangkan studi Instagram (Okan, 2024) menyoroti sosialisasi kepada pemilih; fokus, metode, dan kerangka teorinya berbeda sehingga belum diketahui apakah pola pada satu sistem berhubungan atau justru berlawanan dengan pola pada sistem lain. Kesenjangan kedua bersifat komparatif pada tingkat makro: belum ada kajian yang menyandingkan pola mikro pada sistem individual KPU kota dengan capaian tata kelola elektronik nasional, sehingga belum jelas apakah pola tersebut mencerminkan kecenderungan struktural atau sekadar kekhasan kedua sistem.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana profil dan tingkat kematangan digitalisasi SIAKBA dibandingkan dengan Instagram sebagai wakil fungsi administratif dan partisipatif KPU Kota Semarang? Kedua, mengapa tingkat kematangan keduanya berbeda, dan apakah perbedaan itu lebih tepat dijelaskan sebagai pilihan desain kelembagaan atau sebagai keterbatasan struktural, misalnya sumber daya atau infrastruktur akses digital warga? Ketiga, sejauh mana pola pada SIAKBA dan Instagram sejalan dengan kecenderungan digitalisasi tata kelola pemilu di tingkat nasional dan regional Asia Tenggara?

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberi tiga sumbangan yang saling berkaitan. Secara teoretis, studi ini memperlihatkan bahwa kerangka tata kelola elektronik yang lazim dipakai pada organisasi pemerintah dapat diterapkan secara presisi untuk membandingkan dua sistem dalam satu institusi, sehingga hasilnya lebih tajam daripada analisis ekosistem digital secara keseluruhan. Secara praktis, perbandingan yang konkret dapat menjadi rujukan bagi KPU Kota Semarang dalam merancang perbaikan Instagram tanpa mengorbankan capaian SIAKBA. Secara kebijakan, temuan ini relevan bagi perdebatan arah digitalisasi pemerintahan, terutama karena kapasitas inovasi politik terbukti berperan dalam partisipasi pemilih di Indonesia (Gultom et al., 2026) dan kelompok pemilih muda menuntut kanal yang lebih interaktif.

LANDASAN TEORI

Tahap Perkembangan Pemerintahan Elektronik

Model empat tahap yang dirumuskan Layne dan Lee memandang digitalisasi lembaga publik sebagai proses bertingkat, mulai dari penyajian informasi, transaksi elektronik sederhana, hingga integrasi vertikal dan horizontal antarlembaga. Model tahap semacam ini telah banyak ditinjau ulang. Telaah terhadap 39 model kematangan pemerintahan elektronik menyimpulkan bahwa kemampuannya menggambarkan perkembangan e-government terbatas karena banyak faktor internal dan eksternal tidak diperhitungkan (Falco & Kleinhans, 2018). Sintesis atas sebelas meta-model juga menemukan bahwa penilaian kematangan umumnya bertumpu pada sisi penyediaan layanan dan aspek operasional-teknologi, sedangkan penggunaan dan kebermanfaatan e-government belum tertangani (Aisyah et al., 2024). Karena itu, kerangka tahap di sini dipakai sebagai alat baca terbatas untuk

menempatkan SIAKBA sebagai sistem administratif, bukan sebagai ukuran tunggal keberhasilan.

Partisipasi Elektronik

Tangga partisipasi elektronik yang disusun Macintosh membedakan tiga tingkat keterlibatan digital warga: *e-enabling*, yaitu penyediaan informasi dan akses; *e-engaging*, yaitu pelibatan warga dalam konsultasi terbatas; dan *e-empowering*, yaitu pemberian kendali nyata atas keputusan. Kajian tentang partisipasi elektronik melalui media sosial menemukan bahwa sebagian besar inisiatifnya lebih informatif daripada interaktif (Dona et al., 2026). Tinjauan literatur yang lebih baru menyebut pemerintah masih terkunci pada paradigma komunikasi satu arah, lalu merumuskan tantangan serta prasyarat yang perlu dipenuhi agar komunikasi dua arah dengan warga dapat berjalan (Ebneyamini et al., 2018). Kerangka tangga ini digunakan untuk menilai apakah Instagram KPU Kota Semarang telah bergerak melampaui penyediaan informasi.

Ruang Publik Deliberatif

Kedua kerangka tersebut berakar pada gagasan ruang publik deliberatif Habermas, yakni ruang komunikasi rasional-kritis yang independen dari kendali negara sebagai prasyarat demokrasi yang sehat. Djatmiko et al. (2025) menilai digitalisasi memperluas sekaligus memecah ruang publik dan menjadikan setiap pengguna berpotensi menjadi penulis. Dalam penelitian ini gagasan tersebut berfungsi sebagai tolok ukur normatif: apakah digitalisasi benar-benar memperluas demokrasi, atau hanya memindahkan birokrasi yang sudah ada ke ranah digital.

Pendekatan Terpadu

Penelitian ini memadukan perspektif tata kelola elektronik (*e-government/e-governance*) dan komunikasi politik digital di bawah payung teori deliberatif. Perspektif tata kelola elektronik dipakai untuk menilai kematangan teknis SIAKBA, perspektif komunikasi politik digital untuk menilai kedalaman keterlibatan warga di Instagram, dan teori ruang publik memberi ukuran normatif bagi keduanya.

METODE

Desain dan Sumber Data

Penelitian ini memakai desain studi kasus kualitatif dengan strategi perbandingan dua kasus dalam satu institusi (Ayanian & Tausch, 2025). Data diperoleh dari analisis dokumen kelembagaan dan sintesis literatur akademik tentang SIAKBA dan Instagram KPU Kota Semarang. Sumber utamanya meliputi dokumentasi resmi SIAKBA yang diterbitkan KPU Kota Semarang; publikasi ilmiah bertelaah sejawat tentang penerapan SIAKBA (Fauzi et al., 2025) dan sosialisasi melalui Instagram (Okan, 2024); arsip unggahan serta pernyataan resmi komisi tentang pengelolaan media sosial (Febriyan et al., 2025); dan data pembandingan nasional dari World Bank.

Konstruk Penelitian

Karena berbasis studi kasus kualitatif, istilah variabel pada penelitian ini tidak berarti variabel statistik-kuantitatif. Istilah itu merujuk pada konsep kunci (konstruk) yang menjadi unit analisis untuk membandingkan SIAKBA dan Instagram secara sistematis. Konstruk-konstruk tersebut dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Konstruk, definisi operasional, dan indikator penelitian

Sistem	Konstruk	Definisi Operasional	Indikator yang Diamati
SIAKBA	Digitalisasi administratif	Tingkat adopsi sistem elektronik untuk memproses rekrutmen PPK	Cakupan fungsi, integrasi prosedural, konsistensi penggunaan lintas siklus pemilu
Instagram	Digitalisasi partisipatif	Intensitas dan sifat interaksi kanal digital dengan warga	Frekuensi unggahan, jenis konten, tingkat interaktivitas (komentar, respons, dialog dua arah)
Keduanya	Posisi pada tangga partisipasi	Tingkat keterlibatan warga menurut kerangka Macintosh	Klasifikasi <i>e-enabling</i> , <i>e-engaging</i> , atau <i>e-empowering</i>
Konteks nasional	Kematangan GovTech nasional	Skor komposit maturitas digital sektor publik Indonesia	Skor GovTech Maturity Index dan tren pengguna internet nasional

Keempat konstruk itu memungkinkan perbandingan kematangan SIAKBA dan Instagram secara sistematis sekaligus penilaian hubungan keduanya dengan data pembandingan nasional.

Teknik Analisis Data

Analisis berlangsung dalam tiga langkah: reduksi data, penyajian data dalam matriks perbandingan (Tabel 2), dan penarikan kesimpulan yang ditafsirkan melalui kerangka tahap e-government serta tangga partisipasi elektronik. Untuk memformalkan pola temuan, digunakan rumus interpretatif sederhana yang mengubah hasil koding kualitatif atas kedua sistem menjadi skor ordinal sehingga keduanya dapat dibandingkan langsung. Rumus ini merupakan heuristik interpretatif, bukan uji statistik inferensial:

$$\text{KDD} = \text{TKA} - \text{TKP} \quad (1)$$

KDD adalah kesenjangan digitalisasi demokrasi. TKA (tingkat kematangan administratif) merupakan skor ordinal 1–3 untuk SIAKBA, dan TKP (tingkat kematangan partisipatif) merupakan skor ordinal 1–3 untuk Instagram. Skor diberikan berdasarkan bukti dokumenter yang dibahas pada bagian hasil dan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SIAKBA: Digitalisasi Administratif yang Matang

SIAKBA adalah aplikasi elektronik yang mendukung rekrutmen dan pengelolaan PPK di KPU Kota Semarang. Studi terdahulu tentang penerapannya (Djarmiko et al., 2025). menunjukkan bahwa sistem ini menggantikan prosedur rekrutmen manual berbasis kertas dengan alur kerja elektronik yang lebih terstruktur, mencakup pendaftaran, verifikasi berkas, hingga pengumuman hasil seleksi. Adopsi tersebut sejalan dengan pola umum digitalisasi administrasi pemilu, yaitu teknologi lebih dahulu dipakai pada fungsi yang dapat menekan beban administratif, memperbaiki akurasi data, dan memperkuat kepatuhan terhadap regulasi kepemiluan.

Kematangan SIAKBA tercermin dalam tiga karakteristik. Pertama, sistem ini dipakai secara konsisten lintas siklus pemilu, sehingga bukan sekadar proyek percontohan, melainkan sudah menjadi bagian dari prosedur operasional baku komisi. Kedua, fungsinya terhubung dengan tahapan administratif lain dalam siklus rekrutmen ad hoc, dari pendaftaran sampai penetapan. Ketiga, sistem ini sepenuhnya berfungsi sebagai alat internal tanpa antarmuka publik yang menuntut keterlibatan warga di luar para pendaftar calon petugas. Karakteristik terakhir penting dicatat: SIAKBA berhasil justru karena tujuannya tidak menuntut dialog dua arah dengan publik luas, suatu kondisi yang secara struktural berbeda dengan yang dihadapi Instagram.

Alasan Pemilihan SIAKBA dan Instagram sebagai Kasus Pembandingan

Di antara banyak sistem digital KPU Kota Semarang, seperti Sipol, Sirekap, dan portal data terbuka (Raquel & Brás, 2025). SIAKBA dan Instagram dipilih atas tiga pertimbangan.

Pertama, keduanya menempati kutub paling ekstrem pada spektrum orientasi sistem, yaitu administratif-internal dan komunikatif-eksternal, sehingga kontrasnya paling tajam untuk menguji dugaan asimetri digitalisasi. Sipol dan Sirekap memang administratif, tetapi beroperasi pada tingkat nasional dan diwariskan kepada seluruh KPU daerah, sehingga tidak secara khusus mencerminkan pilihan desain KPU Kota Semarang, berbeda dengan SIAKBA yang dikelola secara lokal. Kedua, keduanya memiliki jejak kajian akademik independen yang telah ditelaah sejawat, yaitu Arif (2025) untuk SIAKBA dan (Aisyah et al., 2024) untuk Instagram, sehingga analisis tidak bertumpu pada observasi tunggal peneliti dan dapat divalidasi silang. Ketiga, keduanya representatif: SIAKBA mewakili kategori sistem administratif KPU Kota Semarang, sedangkan Instagram mewakili kategori kanal komunikasi digital kepada warga, sehingga pola yang ditemukan kemungkinan mencerminkan pola kategorinya dan bukan sekadar kekhasan masing-masing sistem.

Instagram: Digitalisasi Partisipatif yang Belum Matang

Instagram merupakan kanal yang paling langsung berhadapan dengan warga dan telah dikaji khusus perannya dalam sosialisasi Pemilu 2024 kepada pemilih muda di Kota Semarang (Gultom & Dirgantara, 2020). Kajian berbasis etnografi digital dan wawancara itu menemukan bahwa konten akun tersebut meningkatkan kesadaran dan minat politik pemilih muda serta pemilih pemula terhadap Pemilu 2024, dan informasi yang diunggah membantu memotivasi pemilih untuk terlibat. Pada saat yang sama, konten akun bukan satu-satunya faktor yang menggerakkan pemilih muda, dan yang terpenting, akun tersebut belum mencerminkan komunikasi yang benar-benar interaktif: sikapnya terhadap audiens tetap relatif pasif meskipun bernilai informasional.

Pernyataan kelembagaan memperkuat pembacaan ini. Dalam rapat koordinasi tentang pengelolaan media sosial (Falco & Kleinhans, 2018), pimpinan komisi menekankan perlunya kesinambungan, terutama dalam serah terima akun antaranggota badan ad hoc yang silih berganti, serta konsistensi penyebaran informasi. Pimpinan juga menekankan pemetaan kelompok rentan, termasuk masyarakat terisolasi secara geografis, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas, agar sosialisasi lebih tepat sasaran. Pernyataan tersebut menunjukkan kesadaran akan tantangan inklusi dan kesinambungan, tetapi lebih banyak dibingkai sebagai persoalan operasional dan penyebaran informasi daripada agenda untuk menjadikan platform komisi benar-benar dua arah. Kajian komparatif tentang strategi KPU melayani pemilih penyandang disabilitas di Jawa Tengah menambah lapisan penting: kebijakan aksesibilitas pemilu di Indonesia masih berkutat pada aksesibilitas fisik di tempat pemungutan suara, dengan perhatian yang jauh lebih terbatas pada aksesibilitas kanal informasi digital seperti Instagram bagi pemilih dengan disabilitas sensorik atau kognitif (Alam et al., 2025).

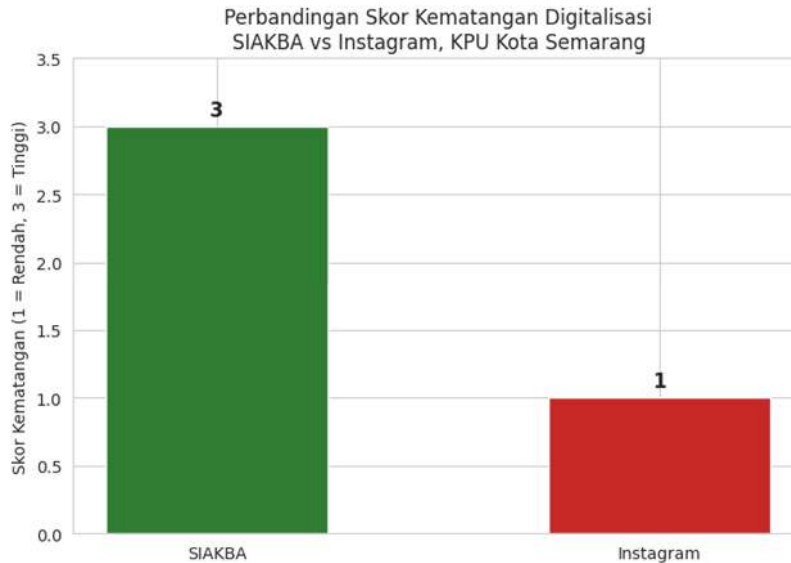
Temuan ini selaras dengan pola partisipasi pada Pemilihan Wali Kota Semarang 2024. Partisipasi pemilih mencapai 71,25 persen, tertinggi dalam empat belas tahun terakhir di kota ini (Ayanian & Tausch, 2025), sementara keterlibatan pada Instagram kelembagaan tampak relatif stagnan pada periode yang sama. Peningkatan partisipasi pada pemilihan wali kota Semarang sebelumnya juga pernah dikaji dari perspektif pemasaran politik (Fauzi et al., 2025). Bila dibaca bersama kajian Instagram, tingginya partisipasi tampaknya lebih banyak didorong faktor di luar sosialisasi digital komisi, misalnya mobilisasi kandidat dan jaringan partai, bukan oleh daya persuasif atau dialogis Instagram komisi sendiri.

Pemetaan SIAKBA dan Instagram pada Kerangka Tahap e-Government dan Partisipasi Elektronik

Hasil pemetaan kedua sistem pada kerangka tahap e-government dan tangga partisipasi elektronik dirangkum pada Tabel 2, sedangkan perbandingan skor kematangannya disajikan pada Gambar 1.

Tabel 2. Pemetaan SIKBA dan Instagram pada kerangka analisis

Kerangka	SIKBA	Instagram
Tahap e-government	Tahap integrasi; terhubung penuh dengan alur kerja rekrutmen PPK lintas siklus pemilu	Tahap penyajian unggahan informasi searah; belum bertransaksi atau berintegrasi
Tangga e-participation	Tidak relevan; sistem internal, bukan kanal partisipasi warga	<i>E-enabling</i> (menyediakan informasi dan akses); belum mencapai <i>e-engaging</i>
Skor kematangan (1–3)	3 (tinggi)	1 (rendah)



Gambar 1. Perbandingan skor kematangan digitalisasi SIKBA dan Instagram, KPU Kota Semarang

Berdasarkan pemetaan tersebut, skor TKA untuk SIKBA adalah 3 karena sistem ini matang dan terintegrasi secara prosedural lintas siklus pemilu, sedangkan skor TKP untuk Instagram adalah 1 karena baru berada pada tahap *e-enabling* dengan interaksi dua arah yang minim. Dengan rumus (1), $KDD = 3 - 1 = 2$, yaitu nilai kesenjangan maksimum dalam rentang teoretis rumus ini.

Pada tangga partisipasi elektronik, Instagram menunjukkan capaian cukup kuat pada tingkat *e-enabling* melalui unggahan rutin tentang tahapan dan jadwal pemilu. Pada tingkat *e-engaging*, capaiannya jauh lebih terbatas: kajian akademik secara eksplisit menemukan minimnya komunikasi interaktif, dan tidak ditemukan bukti adanya mekanisme konsultasi publik yang terstruktur dan berulang. SIKBA tidak relevan dinilai pada tangga ini karena fungsinya murni internal. Perbandingan itu justru menegaskan argumen sentral penelitian: KPU Kota Semarang membagi kematangan digitalnya secara tidak merata, dengan sistem internal mencapai tahap integrasi penuh sementara kanal warga tertahan pada tahap paling dasar. Kondisi ini sejalan dengan gambaran bahwa pemerintah umumnya masih berada pada paradigma komunikasi satu arah (Falco & Kleinhans, 2018).

Perbandingan dengan KPU Kabupaten Semarang, daerah yang bertetangga secara administratif tetapi terpisah dari Kota Semarang, memperkuat gambaran ini. KPU Kabupaten Semarang telah merintis program Sapa Pemilih melalui siaran langsung di TikTok dan Instagram (Arif, 2025), format yang memungkinkan pertanyaan warga dijawab secara langsung dan real-time, bukan melalui unggahan searah. Keberadaan program itu menunjukkan bahwa platform media sosial arus utama yang sama dapat dimanfaatkan secara lebih dialogis oleh lembaga setingkat tanpa investasi teknologi baru yang berarti. Dengan demikian, kesenjangan antara SIKBA dan Instagram tidak semata-mata disebabkan

keterbatasan teknologi atau sumber daya, melainkan mencerminkan pilihan desain dan prioritas kelembagaan.

Menuju Kesetaraan Digitalisasi: Rekomendasi

Tiga penyesuaian dapat mempersempit kesenjangan antara SIAKBA dan Instagram tanpa mengorbankan capaian SIAKBA. Pertama, Instagram dapat mengadopsi format interaktif yang terstruktur dan terjadwal, seperti sesi tanya jawab langsung yang telah dirintis KPU Kabupaten Semarang, dan tidak hanya mengandalkan unggahan searah. Kedua, prinsip standarisasi prosedural yang terbukti berhasil pada SIAKBA, yaitu alur kerja yang jelas, konsisten lintas siklus, dan terdokumentasi baik, dapat diadaptasi untuk merancang protokol interaksi warga di Instagram, misalnya jadwal tetap sesi tanya jawab atau standar waktu respons komentar. Ketiga, kepedulian komisi terhadap kelompok rentan dapat dioperasionalkan melalui desain konten yang lebih inklusif, seperti teks alternatif pada gambar dan bahasa yang disederhanakan, dengan standar aksesibilitas yang idealnya seketat standar prosedural pada SIAKBA.

Konteks Nasional: Data Pembanding dari World Bank

Untuk menguji apakah asimetri antara SIAKBA dan Instagram hanyalah kekhasan kedua sistem atau mencerminkan kecenderungan struktural, temuan kualitatif di atas dibandingkan dengan data kuantitatif nasional dari World Bank.

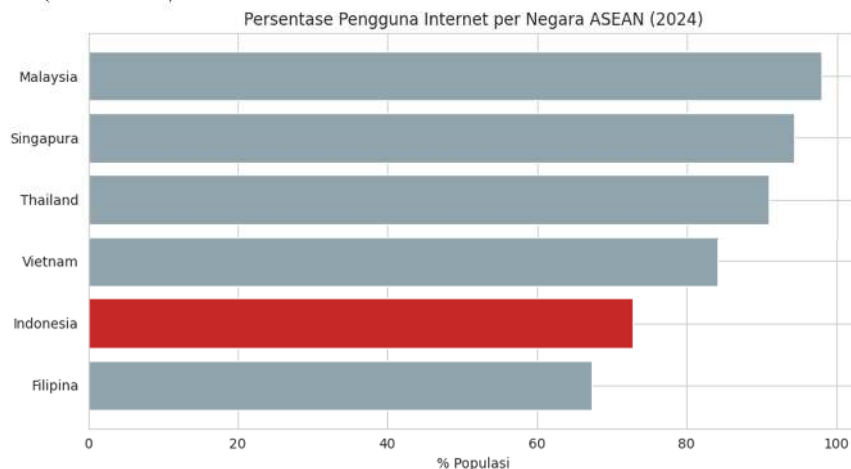
GovTech Maturity Index (GTMI) adalah indeks komposit World Bank untuk mengukur kematangan transformasi digital sektor publik di 198 negara, yang dibangun dari empat dimensi: Core Government Systems Index, Public Service Delivery Index, Digital Citizen Engagement Index, dan GovTech Enablers Index. Struktur ini sejalan dengan fokus penelitian, yaitu SIAKBA sebagai wakil sistem inti pemerintahan dan Instagram sebagai wakil keterlibatan digital warga. Menurut pembaruan GTMI 2022, skor komposit Indonesia mencapai 0,817 (skala 0–1), naik dari 0,704 pada edisi 2020, sehingga Indonesia berpindah dari Grup B ke Grup A (pemimpin GovTech) bersama Korea Selatan, Malaysia, Mongolia, Singapura, dan Thailand, yang merupakan enam negara Grup A di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Laporan regional tersebut mencatat bahwa kemajuan pesat kawasan terutama didorong perbaikan sistem inti pemerintahan dan penyampaian layanan, sedangkan kemajuan dimensi keterlibatan digital warga konsisten paling lambat, bahkan di antara negara Grup A (World Bank, 2023). Pola inilah yang mencerminkan temuan mikro pada SIAKBA dan Instagram: kematangan tinggi pada sistem administratif inti berjalan berdampingan dengan ketertinggalan struktural pada keterlibatan warga, suatu pola yang tampak sistemik pada tingkat nasional maupun kawasan.

Data deret waktu World Bank Open Data menunjukkan bahwa persentase penduduk Indonesia yang menggunakan internet naik pesat dari 22,06 persen pada 2015 menjadi 72,78 persen pada 2024 (Gambar 2).



Gambar 2. Persentase penduduk Indonesia yang menggunakan internet, 2015–2024 (Sumber: World Bank Open Data, indikator IT.NET.USER.ZS)

Meskipun demikian, dibandingkan negara ASEAN lain pada tahun yang sama, posisi Indonesia relatif tertinggal. Malaysia mencatat 98,02 persen, Singapura 94,38 persen, Thailand 90,87 persen, dan Vietnam 84,15 persen, sedangkan Indonesia berada pada 72,78 persen, hanya lebih tinggi daripada Filipina (67,26 persen) di antara enam negara yang dibandingkan (Gambar 3).



Gambar 3. Persentase pengguna internet enam negara ASEAN, 2024 (Sumber: World Bank Open Data, indikator IT.NET.USER.ZS)

Data pertumbuhan ini perlu dibaca bersama temuan tentang Instagram karena keduanya memperlihatkan korelasi yang berlawanan dengan dugaan awal: akses internet nasional yang naik lebih dari tiga kali lipat tidak berkorelasi langsung dengan meningkatnya keterlibatan warga pada Instagram KPU Kota Semarang, yang tetap didominasi komunikasi satu arah bahkan pada Pemilu 2024 ketika akses internet nasional berada pada titik tertinggi. Data pelengkap dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa persentase penduduk Kota Semarang yang mengakses internet melalui notebook atau tablet mencapai 24,48 persen pada 2020, tertinggi di antara 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Angka ini mengindikasikan bahwa persoalannya bukan pada sisi permintaan warga, sebab kapasitas digital penduduk kota relatif memadai. Dengan kata lain, pertumbuhan infrastruktur dan akses digital nasional bersifat perlu tetapi tidak cukup bagi terbentuknya keterlibatan digital yang sungguh-sungguh di tingkat kelembagaan lokal: ketersediaan akses tidak otomatis

berubah menjadi penggunaan aktif kanal partisipasi, terutama bila kanal itu sejak awal dirancang pasif dan searah, seperti pada Instagram. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kesenjangan antara SIAKBA dan Instagram lebih tepat dijelaskan oleh pilihan desain komunikasi kelembagaan daripada oleh keterbatasan infrastruktur atau akses digital warga.

SIMPULAN

Penelitian ini membandingkan SIAKBA dan Instagram sebagai dua sistem digital yang mewakili fungsi administratif dan partisipatif KPU Kota Semarang. Buktinya memperlihatkan asimetri yang tajam. SIAKBA telah menjadi sistem yang matang, terintegrasi secara prosedural, dan dipakai konsisten lintas siklus pemilu sehingga mencapai tahap integrasi penuh. Instagram, sebaliknya, memang meningkatkan kesadaran politik pemilih muda dan pemilih pemula, tetapi belum benar-benar interaktif dan tertahan pada tahap *e-enabling* dalam tangga partisipasi. Perhitungan interpretatif dengan rumus $KDD = TKA - TKP$ menegaskan pola ini secara formal, yakni $KDD = 3 - 1 = 2$, nilai kesenjangan maksimum pada rentang teoretis rumus. Perbandingan dengan KPU Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa kesenjangan tersebut bukan keniscayaan teknologi karena lembaga setingkat telah mampu menghadirkan format komunikasi yang lebih interaktif dengan perangkat yang sama. Data pembanding World Bank memperkuat temuan ini: kemajuan digitalisasi Indonesia, juga kawasan Asia Timur dan Pasifik, ditopang sistem inti pemerintahan, sementara keterlibatan digital warga konsisten tertinggal dan tidak berkorelasi dengan pesatnya pertumbuhan akses internet. Pengalaman SIAKBA dan Instagram dengan demikian menggambarkan bagaimana satu institusi dapat mendigitalkan operasi internalnya secara matang sembari mempertahankan komunikasi satu arah dengan publik. Mempersempit kesenjangan itu melalui praktik media sosial yang lebih interaktif dan standar aksesibilitas yang setara dengan standar prosedural SIAKBA menjadi tahap berikutnya dalam transformasi digital komisi.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki empat keterbatasan. Pertama, fokus sengaja dipersempit pada dua sistem dari ekosistem digital KPU Kota Semarang yang jauh lebih luas, termasuk Sipol, Sirekap, dan portal data terbuka; kedalaman analisis meningkat, tetapi temuan tidak dapat digeneralisasi pada seluruh ekosistem. Kedua, desain studi kasus kualitatif membuat temuan tidak serta-merta berlaku bagi seluruh KPU kabupaten/kota di Indonesia, walaupun polanya konsisten dengan data pembanding nasional, dan perbandingan dengan KPU Kabupaten Semarang bersifat ilustratif, bukan analisis komparatif sistematis. Ketiga, penelitian bertumpu pada data sekunder berupa dokumen kelembagaan daring dan publikasi akademik terdahulu tanpa wawancara langsung dengan staf KPU Kota Semarang atau pengguna kedua sistem, sehingga pertimbangan internal di balik pilihan desain tidak tertangkap. Keempat, rumus KDD merupakan heuristik interpretatif yang dikembangkan sendiri oleh peneliti dan belum divalidasi secara empiris; skor ordinal 1–3 didasarkan pada penilaian tunggal peneliti sehingga berpotensi mengandung subjektivitas interpretatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Hidayah, Z., Juniadi, D., Purnomo, E. P., Wibowo, A. M., & Harta, R. (2024). *International Journal of Sustainable Development and Planning Transforming Smart City Governance for Quality of Life and Sustainable Development in Semarang City , Indonesia*. 19(9), 3443–3452.
- Alam, S. A. N., Cahyo Seftyono, & Moh. Nizar. (2025). PARTICIPATION OF VOTERS WITH DISABILITIES IN ELECTION IN INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY OF KPU STRATEGIES IN. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 11(2), 135–155.

- <https://doi.org/10.29103/jsds.v1i2.23781>
- Arif, N. F. (2025). *The mediating role of Market Orientation in the relationship between marketing capability and social capital on innovation performance*. 17(1). <https://doi.org/10.7454/amj.v17i1.1295>
- Ayanian, A. H., & Tausch, N. (2025). *Collective Action Under Repressive Conditions : Integration of Individual , Group , and Structural Level Research , Recommendations , and Reflections*. <https://doi.org/10.1111/sipr.70000>
- Djarmiko, G. H., Sinaga, O., & Pawirosumarto, S. (2025). *Digital Transformation and Social Inclusion in Public Services : A Qualitative Analysis of E-Government Adoption for Marginalized Communities in Sustainable Governance*. 10, 1–28.
- Dona, L., Nouvianti, B., Sellya, N., Amanda, D., Garini, N., & Artikel, S. (2026). *STRATEGI KOMUNIKASI DALAM MEMBANGUN ENGAGEMENT PUBLIK DI MEDIA SOSIAL COMMUNICATION STRATEGIES FOR BUILDING PUBLIC ENGAGEMENT ON SOCIAL MEDIA*. 67–74.
- Ebneyamini, S., Reza, M., & Moghadam, S. (2018). *Toward Developing a Framework for Conducting Case Study Research*. 17, 1–11. <https://doi.org/10.1177/1609406918817954>
- Falco, E., & Kleinhans, R. (2018). *Beyond Information-Sharing . A Typology Of Government Challenges And Requirements For Two-Way Social Media Communication With Citizens*. 16(1), 32–45.
- Fauzi, A., Zainal, V. R., & Hakim, A. (2025). *Implementation of SLAKBA by the Bekasi City General Elections Commission (KPU) in Enhancing the Human Resources of the Ad Hoc Body for the 2024 Regional Head Elections*. 6(6), 4456–4465.
- Febriyan, M. D., Eny Inti Suryani, & Putri Rahmaini. (2025). *Penggunaan Media Sosial pada Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pilkada 2024 di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung*. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5(2).
- Gultom, H. C., & Dirgantara, I. M. B. (2020). *The Phenomenon of Increasing Political Participation in the 2020 Major Election of Semarang with One Candidate Pair in Political Marketing Perspective*. 8478–8492.
- Okan, A. A. (2024). *Exploring the Landscape of e-Government Maturity Models : Insights*. 5(2).
- Raquel, A., & Brás, C. (2025). *Developing Digital Citizenship in the Foreign Language Classroom with an Emphasis on the Intercultural Dimension*. 1–13.